

# SEKILAS APBN

## Budget Issues Quick Response

### PUTUS SEKOLAH KINI, JADI TANGGUNGAN PEMERINTAH DI MASA DEPAN

Marihot Nasution



Masih menyoal angka putus sekolah yang dilaporkan BPS bertambah di tahun 2022, hal yang perlu diwaspadai adalah dampaknya di masa depan yang akan terus menjadi tanggung jawab pemerintah. Meningkatnya angka putus sekolah di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, namun faktor utamanya adalah faktor ekonomi. Hal ini diperparah ketika terjadi pandemi Covid-19. Unicef menyebutkan bahwa pandemi menyulut lonjakan kasus putus sekolah karena faktor kemiskinan. Temuan Unicef dalam Kompas.com (Maret 2022) menyatakan bahwa ada 70 persen anak putus sekolah selama pandemi disebabkan oleh faktor ekonomi. Sebelum pandemi, faktor kemiskinan hanya menyumbang 38 persen terhadap kasus putus sekolah. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) juga mengungkapkan situasi serupa.

Sementara itu, bantuan sosial bagi siswa miskin dari pemerintah yang dikhususkan pada bidang pendidikan yang dikenal sebagai Program Indonesia Pintar (PIP) jumlahnya berkurang. Pengurangan ini terjadi pada bantuan siswa miskin pada pendidikan dasar dan menengah yang disalurkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Secara keseluruhan bantuan siswa miskin bertambah jika angka bantuan PIP Kuliah ikut dalam penghitungan, Namun, khusus untuk pendidikan dasar dan menengah jumlah bantuan PIP turun sejak tahun 2020 dari Rp13,76 triliun, menjadi Rp9,65 triliun di tahun 2021 dan menjadi Rp9,63 triliun di tahun 2022. Selain itu, terdapat juga indikasi bantuan sosial pendidikan tersebut tidak tepat sasaran akibat faktor inakurasi data penerima manfaat, dan kurangnya besaran manfaat bantuan bagi siswa. Nilai besaran PIP per orang tidak mengalami peningkatan sejak pertama diterapkan sementara biaya sekolah terus meningkat.

Kemendikbudristek menyebut angka putus sekolah yang dirilis BPS tersebut masih dalam jumlah yang kecil. Namun demikian, angka yang kecil tersebut memiliki efek multiplier yang tinggi. Efek multiplier tersebut nantinya akan ditanggung oleh pemerintah dalam bentuk anggaran. Konsekuensi anggaran yang disebabkan oleh putus sekolah atau rendahnya tingkat pendidikan muncul akibat beberapa dampak. **Pertama**, kemiskinan dan ketimpangan; individu yang tidak memiliki pendidikan formal biasanya memiliki kesempatan kerja yang terbatas dan pendapatan yang rendah, yang pada gilirannya akan hidup miskin dan dapat memperburuk kesenjangan ekonomi antara individu-individu. Hingga kini, pemerintah menyiapkan anggaran bagi kaum miskin salah satunya Program Keluarga Harapan (PKH). Bantuan ini diberikan 10 juta keluarga miskin/rentan miskin dengan besaran Rp200 ribu sampai Rp3 jutaan tergantung dari kategori penerima. Bantuan lain diantaranya Program Kartu Sembako, PIP sendiri, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Total anggaran untuk perlindungan sosial yang disiapkan di tahun 2023 mencapai Rp479,1 triliun. Dengan adanya anak putus sekolah yang bertambah, dimungkinkan nilai bantuan akan terus bertambah karena penerimanya berpotensi terus bertambah.

**Kedua**, tingkat pengangguran yang tinggi; individu yang tidak menyelesaikan pendidikan formal cenderung menghadapi kesulitan dalam mencari pekerjaan yang layak. Tingkat pengangguran yang tinggi dapat menyebabkan beban ekonomi yang lebih besar bagi negara, baik dalam hal dukungan sosial maupun penurunan kontribusi pajak. Tahun 2023, pemerintah juga masih menyiapkan anggaran bagi pengangguran dalam bentuk Kartu Prakerja untuk 1 (satu) juta peserta. Adanya penduduk putus sekolah dapat berpotensi menjadi peserta Kartu Prakerja di masa depan.

**Ketiga**, kurangnya keterampilan, serta rendahnya inovasi dan produktivitas; pendidikan formal memberikan dasar pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berkontribusi dalam ekonomi yang maju. Putus sekolah berarti individu kehilangan kesempatan untuk memperoleh keterampilan yang diperlukan dalam dunia kerja, yang nantinya dapat menghambat kemajuan ekonomi dan teknologi suatu negara.

**Keempat**, kesehatan yang buruk; individu dengan pendidikan rendah cenderung kurang memahami pentingnya gaya hidup sehat, akses terhadap perawatan medis, dan informasi kesehatan yang penting. Dampak dari hal tersebut salah satunya hadirnya *stunting* pada keturunannya, hingga kini Indonesia masih berperang melawan *stunting* dan belum dapat dikatakan menang karena angka *stunting* masih tinggi meskipun anggaran yang dikeluarkan beranjak naik.

Oleh karena itu, meskipun jumlah peningkatan angka putus sekolah kecil namun konsekuensi di masa depan terutama bagi anggaran negara cukup serius.